



Ahok Tantang Tjahjo Debat Besok Paripurna Hak Angket DPRD

Balai Kota, Warta Kota

Proses pencairan APBD 2015 DKI Jakarta masih mengalami kekisruhan dengan DPRD DKI, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri. Ada kabar kalau draft APBD dikembalikan lagi oleh Kementerian Dalam Negeri karena anggaran belanja pegawai terlalu besar.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan sebanyak 80 persen anggaran APBD DKI diperuntukkan belanja pegawai. Sedangkan, 20 persennya untuk pembangunan infrastruktur.

Mendengar pernyataan tersebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meradang. Ia menantang Mendagri untuk berdiskusi menjelaskan besaran anggaran tersebut.

"Mana ada 80 persen. Coba bandingkan dengan yang lain. Tim pengendalian teknis kami buang honorinya. Honor pengadaan kami buang dan honor-honor lain dibuang. Jadi di mana alasannya? Sudah bikin surat resmi ke kami, biar bisa berdebat," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (24/2)

Bahkan, tak hanya itu, Ahok juga mempertanyakan kenapa Kemendagri enggan mengungkap hasil temuan BPKP selama dua tahun belakangan, terkait dana siluman yang tercantum di APBD.

"Makanya kami lihat saja. Dulu lebih besar dia *ngumpetin* honorer. Ini cari-cari alasan saja kalau besar, kami akan potong. Makanya saya pikir sekarang mau diproses enggak temuan BPKP dua kali (dana siluman)?" kata Ahok, sapaan Basuki.

Ahok mengatakan, kenapa Mendagri enggak ngomong soal temuan BPKP mengenai dana siluman. "Ini bukan saya yang ngomong, tapi BPKP soal anggaran siluman sebelum *e-budgeting*. Kenapa enggak mau ngomong," katanya.

Gertak sambal

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta berencana menggelar rapat paripurna hak angket pada Kamis (26/2). Jhonny Simanjuntak, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, mengatakan, dari 106 anggota DPD, sudah ada 98 anggota yang menandatangani persetuju-

an digelarnya hak angket.

"Sisanya masih belum tanda tangan karena masalah teknis. Masih ada yang di daerah ikut KNPI," kata Jhonny.

Sedangkan Uchok Sky Khadafi, Direktur Center Budget for Analysis, mengatakan, hak angket dari DPRD hanya gertak sambal. Tujuan utama agar dewan melakukan negosiasi

” Hak angket dari DPRD hanya gertak sambal. Tujuan utama agar dewan melakukan negosiasi ulang dengan Ahok terkait APBD.

UCHOK SKY KHADAFI

ulang dengan Ahok terkait APBD.

Uchok mengatakan, DPRD marah adalah wajar karena usulan kegiatan Dewan yang tidak diakomodir oleh eksekutif. Ahok juga merupakan biang kerok dari kemarahan anggota dewan tersebut.

Kirim surat

Ahok mengatakan, tidak permasalahan DPRD membuat hak angket. Ia tetap memiliki data lain dari BPKP soal dana siluman yang muncul di APBD.

Ahok memberikan contoh ada pembelian UPS seharga Rp 4,2 miliar. Ia bertanya kepada lurah soal pembelian UPS, dan lurah mengatakan tidak pernah memasukkan anggaran untuk pembelian UPS.

"Berarti barang yang ditemukan BPKP ini barang siluman, tiba-tiba muncul. Seluruh kota Jakarta Barat, setiap lurah dan camat diberikan UPS dengan total anggaran Rp 4,2 miliar. Masuk akal enggak?" kata Ahok.

Meskipun terkendala APBD, Ahok menegaskan pembangunan di Jakarta jalan terus. "Kamu lihat saja, jalan terus? Orang Jakarta juga enggak terlalu pusing. Yang penting sampah beres, pelayanan terpadu satu pintu

beres," katanya. (suf)

” Mana ada 80 persen. Coba bandingkan dengan yang lain. Tim pengendalian teknis kami buang honorinya. Honor pengadaan kami buang dan honor-honor lain dibuang. Jadi dimana alasannya?

BASUKI TJAHAJA PURNAMA